KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : SARTONO HUTOMO: Anggota Pansus IKN Fraksi Demokrat, Pemerintah Kudu Jauhi Kesan Macam-macam
Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SARTONO HUTOMO

Anggota Pansus IKN Fraksi Demokrat

Pemerintah Kudu Jauhi Kesan Macam-macam



"Untuk ketuanya sih sudah oke ya, karena pernah menjadi wakil Menteri Perhubungan. Wakilnya dari Sinar Mas. Itu yang diperta-nyakan masyarakat. Apa hubungannya? Mengapa mengambil dari Sinar Mas Grup, bukan yang lain.

Bagaimana pandangan Anda mengenai penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala IKN?

Sebagai anggota Pansus IKN, kami tidak bisa intervensi karena untuk menentukan siapa yang punya kapasitas dan integritas adalah Pemerintah. DPR tidak bisa menilai karena tidak melalui *fit and proper* test lagi.

Artinya, yang memutuskan siapa figur yang dianggap mempunyai *track record* yang baik dan bisa menterjemahkan visi misi negara ke depan yakni yang mempunyai kewenangan. Dalam hal ini pihak eksekutif.

Ada kalangan mengkritik penunjukkan Kepala & Wakil Kepala IKN...

Inikan baru ditunjuk. Kita lihat lah kinerjanya setelah diberikan amanat ini. Sekarang ini kita amati saja dulu.

Posisi Wakil Ketua IKN berasal dari pengembang?

Untuk ketuanya sih sudah oke ya, karena pernah menjadi wakil Menteri Perhubungan. Wakilnya dari Sinar Mas. Itu yang dipertanyakan masyarakat. Apa hubungannya? Mengapa mengambil dari Sinar Mas Group, bukan yang lain.

Justru ini yang menjadi pertanyaan publik?

Itu juga yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Kan begitu.

Apakan sebaiknya Pemerintah menjelaskan ke publik tentang kritik itu?

Iya harusnya begitu. Pembangunan IKN harus jauh dari kesan yang macam-macam lah. Kalau ketua IKN-nya sudah jelas latar belakangnya. Yakni, pernah dibirokrasi, pernah menjadi wakil Menteri. Track record-nya jelas. Yang musti dijelaskan Pemerintah alasan penunjukkan wakilnya. Karena membangun IKN ini bukan tugas ringan. Ini tugas berat, karena di sana itu hutan rimba. Kosong semua.

Pendapat Anda, apakah membangun IKN, hal prioritas?

Saya berpandangan dalam situasi seperti ini hal yang perlu menjadi prioritas utama mengatasi pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Karena, sekarang ini rakyat antre minyak dimana-mana. Kemudian, utang kita sudah mencapai Rp 7.000 triliun. Intinya ekonomi kita sangat berat. Seharusnya fokus kita bukan untuk memindahkan IKN. ■ REN